

kilas

Mandiri Akhirnya
Buka Cabang
di Shanghai

JAKARTA — PT Bank Mandiri Tbk akhirnya berhasil membuka kantor cabang operasional di Shanghai, Cina. Direktur Perbendaharaan dan Pengelolaan Aset Khusus Institusi Keuangan Bank Mandiri, Thomas Arifin, mengatakan cabang baru yang telah diupayakan sejak 2007 tersebut diharapkan beroperasi pada semester pertama 2011.

"Kami akan melayani aktivitas perbankan, seperti penghimpunan dana korporasi, penyaluran kredit korporasi, transaksi perdagangan ekspor-impor, dan remitansi," kata Thomas kemarin. Izin dari China Banking Regulatory Commission diberikan pada 3 November 2010 lalu.

Ekspansi Bank Mandiri juga telah menembus Malaysia dengan berdirinya anak perusahaan baru di sana. Pendirian Bank Mandiri Shanghai dan Malaysia ini akan melengkapi jaringan cabang internasional Mandiri menjadi 7 negara di 3 benua. ● AGUS SUPRIYANTO

Realisasi Pajak
73,3 Persen

JAKARTA — Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Iqbal Alamsyah mengungkapkan, hingga akhir Oktober 2010, realisasi penerimaan mencapai Rp 485,1 triliun atau 73,3 persen target. Angka tersebut naik 13,4 persen dibanding periode sama tahun lalu.

"Kami optimistis mencapai 100 persen target. Dua bulan terakhir akan banyak masuk penerimaan dari sektor benda-hara," kata Iqbal di Jakarta kemarin. Untuk PPh migas Rp 42,2 triliun, PPh nonmigas Rp 240,6 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah Rp 171,5 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan Rp 22,5 triliun. ● EVANA DEWI

Kredit Korban
Merapi Bakal
Dihapus

Bank Mandiri
merestrukturisasi
kredit.

JAKARTA — Pemerintah berencana menghapus kredit pelaku usaha kecil-mengah korban letusan Gunung Merapi. "Tergantung payung hukumnya. Kalau keputusan presiden memberikan, saya kira bisa," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono kemarin.

Saat ini sedang dilakukan pendataan jumlah penerima kredit usaha yang terkena dampak bencana. Menurut Agung, pemerintah masih melakukan koordinasi dengan semua pihak membahas penghapusan utang korban Merapi.

Menurut Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Mantik, penangguhan kewajiban bisa dilakukan jika status bencana Merapi menjadi bencana nasional. Tanggungan kewajiban yang bisa dilakukan, antara lain, "Menanggung kewajiban utang kredit usaha rakyat (KUR)."

Hingga kini pemerintah belum menetapkan status letusan Merapi sebagai bencana nasional.

Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional Sigit Pramono mendukung restrukturisasi utang korban Merapi. Namun, kata dia, sampai kini belum ada keputusan dari bank. "Biasanya, kalau ada bencana, pasti ada keringanan," katanya.

Restrukturisasi kredit



Agung Laksono

pernah diberikan ketika terjadi gempa bumi empat tahun lalu di Yogyakarta. Saat itu, kata Sigit, diberikan dua opsi kepada nasabah. Pertama, memperpanjang jangka waktu pelunasan kredit hingga dua kali lipat, dan kedua, mengurangi jumlah beban kredit.

Menurut Direktur Mikro dan Retail Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, kredit nasabah yang terkena bencana akan ditangani secara khusus.

Dalam aturan bank sentral disebutkan, ketika terjadi bencana, sebuah kredit tak akan langsung dimasukkan ke golongan kredit macet (nonperforming loan). Sebagai gantinya, kata Budi, akan dilakukan restrukturisasi kredit selama beberapa bulan.

Sesuai dengan ketentuan, hapus buku bisa diberlakukan kepada nasabah yang hilang atau meninggal. "Istilahnya bukan pemutihan. Jika hilang, otomatis kita hapus buku," kata Budi.

Jumlah dana usaha kecil dan menengah Mandiri yang disalurkan di Yogyakarta dan sekitarnya sebesar Rp 1,5 mi-

liar, dengan rata-rata kredit sebesar Rp 18 juta per usaha.

Budi mengatakan, sampai kini pihaknya masih mendata jenis kerugian yang diterima nasabah. Untuk melakukan hal ini, masih ada kendala karena masih dalam tanggap bencana. "Sebagian besar karakter nasabahnya pedagang."

Sekretaris Perusahaan PT Bank BNI Tbk (Persero) Putu Kresna menyatakan, pihaknya masih berfokus pada penanganan bantuan bencana. "Nanti kalau sudah settle down," katanya.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Rochadi menyatakan belum ada ketentuan mengenai pembagian kerugian pada kredit nasabah yang terkena dampak bencana. Karena itu, pihaknya masih menunggu usulan dari perbankan mengenai pembagian kerugian.

Bank sentral, kata dia, bisa saja memudahkan ketentuannya mengatasi kesulitan nasabah dalam membayar kredit. Hal ini bisa ditempuh dengan meringankan kolektibilitas atau restrukturisasi kredit.

Juru bicara Bank Indonesia, Difi Ahmad Johansyah, mengatakan pihaknya sedang mengkolleksi data kreditor di daerah bencana, khususnya sekitar Merapi. Dari data itu, selanjutnya akan diidentifikasi kredit mana saja yang bisa mendapat keringanan. Mengenai keringanan untuk nasabah, Bank Indonesia menyerahkannya kepada perbankan.

● EKO ARI WIBOWO | ANTON WILLIAM | FEBRIANA FIRDAUS | UKKY PRIMARTANTYO

Penerbitan SPN
3 Bulan Dikaji

JAKARTA — Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto mengatakan, pemerintah bersama Bank Indonesia masih mengkaji langkah yang akan diambil pasca-kebijakan Bank Indonesia tak melong Sertifikat Bank Indonesia bertenor 3 bulanan.

Menurut dia, tak diterbitkannya SBI 3 bulan makin meyakinkan perlunya pemerintah menerbitkan Surat Perbendaharaan Negara/SPN (Treasury Bills) bertenor 3 bulan. Apalagi, SBI dan SPN adalah dua instrumen pasar uang yang identik. "SPN 3 bulanan tersebut diharapkan menjadi patokan untuk pengembangan pasar uang dan pengelolaan kas negara," kata Rahmat melalui pesan singkatnya kepada *Tempo* kemarin.

Penghentian penerbitan SBI—termasuk yang bertenor 3 bulan—akan mengurangi fragmentasi dan perebutan (*crowding out*) di pasar uang. Dengan begitu, diharapkan nantinya hal itu akan menurunkan tingkat imbal

hasil Surat Utang Negara, yang tentunya bermakna positif bagi pemerintah. Selama ini bunga SBI 3 bulan dijadikan referensi imbal hasil Surat Utang Negara berbunga variabel.

Sebelumnya, Bank Indonesia memutuskan tak menawarkan SBI 3 bulan. Hal itu bertujuan menggiring eksekusi likuiditas ke tenor yang lebih panjang. Sementara ini BI hanya menawarkan SBI 6 dan 9 bulan serta *term deposit* 1 dan 3 bulan.

Deputi Gubernur BI Budi Rochadi mengatakan, bank sentral terus menggali segala kemungkinan kebijakan untuk mengelola banjir modal asing. Meski demikian, Bank Indonesia belum berkeinginan melakukan pembatasan (kontrol) arus modal.

BI, kata dia, bisa saja mengeluarkan kebijakan pengetatan arus masuk dalam bentuk pelarangan. Namun bank sentral lebih condong pada kebijakan pengetatan keran arus. Berbeda di Thailand, yang mengetatkan keran arus dana keluar. ● EVANA DEWI | ANTON WILLIAM



Public & In House

- Introduction
- Internal Auditor
- Lead Auditor
- Integrated Management System



- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 22000
- ISO/TS 16949
- OHSAS 18001

PT. Standard Training

Jakarta - Ela - T: 021- 536 60660 / 536 1370
 Surabaya - Maida - T: 031- 548 2712
 Semarang - Fahmia - T: 024- 841 2669
 Balikpapan - Ida - T: 0542- 412 321 / 417 429
 Makasar - Meri - 081355987567
 standardtraining@cbn.net.id
 www.standardtrainingindonesia.com

Per 1 November 2010

TELAH DIBUKA RUTE BARU

50% Feeder Service - layanan antar ke rumah

DayTrans
SHUTTLE • TRAVEL • COURIER

FX LIFESTYLE X'NTER - DIPATIUKUR

JAM KEBERANGKATAN:

08.15 - 10.15 - 12.15 - 14.15 - 16.15 - 18.15 - 19.15 - 20.15

PANCORAN - DIPATIUKUR

JAM KEBERANGKATAN:

04.45 - 06.45 - 08.45 - 10.45 - 12.45 - 14.45 - 16.45 - 18.45 - 20.45

Syarat dan ketentuan:

- * Periode 4 - 30 Nov 2010
- * Khusus pemegang kartu Day Trans Addict
- * Diskon 20% untuk umum
- * Area 5 Km dari Dipatiukur



f daytrans

@Day_Trans

www.daytrans.co.id

(021)
(022)

7063 6868